

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Antonopoulos, Andreas M. (2017). *Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain* (2nd ed.). Sebastopol: O'Reilly Media.
- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Penegakan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Chazawi, Adami. (2018). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. (2017). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Hamzah, Andi. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- HR, Ridwan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Koentjaraningrat. (1990). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lamintang, P.A.F. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukti Fajar, & Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyatno, Dwidja. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Pujiati. (2024). *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.

- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2020). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2017). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sunggono, Bambang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. (2015). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tapscott, Don, & Tapscott, Alex. (2018). *Blockchain Revolution: Bagaimana Teknologi di Balik Bitcoin Mengubah Uang, Bisnis, dan Dunia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wijayanta, Tata. (2020). *Hukum Perizinan: Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Jakarta: Bappebti.

C. Sumber Lain

Jurnal

Atmojo, Robert, & Fuad, Fokky. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Hukum to-Ra*, 9 (2), 254-276. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260>. Diakses 25 April 2026.

Suwandi, Robby. (2023). Tantangan Pengaturan Aset Kripto di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Hukum Bisnis*, 42 (3), 312-328.

Kamus dan Dokumen Lembaga

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021). *Cryptocurrency and Money Laundering*. Vienna: UNODC Publishing.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Daftar Pedagang Aset Keuangan Digital Berizin (Whitelist)*, ditetapkan 19 Desember 2025. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Siaran Pers: Whitelist Pedagang Aset Keuangan Digital sebagai Rujukan Resmi Masyarakat*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisiner Bulanan Februari 2026*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Bappebti. (2025). *Siaran Pers Bersama Bappebti–OJK–BI 10 Januari 2025*. https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2025_01_10_zixvifo9_id.pdf. Diakses 25 April 2026.

Budiarso, Adi. (2026). *Pembukaan Bulan Literasi Kripto*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Sumber Internet

Hukumonline. (2025). *OJK dan Bappebti Tuntaskan Peralihan Pengawasan Aset Kripto*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-dan-bappebti-tuntaskan-peralihan-pengawasan-aset-kripto-lt688b33eb69b1f/>. Diakses 25 April 2026.

Katadata. (2024). *Alasan Kominfo Blokir Akun Instagram Bursa Kripto Binance, Bybit, Mexc*. <https://katadata.co.id/digital/fintech/66976fa26cb42/alasan-kominfo-blokir-akun-instagram-bursa-kripto-binance-bybit-mexc>. Diakses 25 April 2026.

Wildan, Muhamad. (2025). *Simak! OJK Rilis Daftar 29 Exchanger yang Berizin dan Terdaftar*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1816161/simak-ojk-rilis-daftar-29-exchanger-yang-berizin-dan-terdaftar>. Diakses 25 April 2026.